

BAB IV

DIPLOMASI PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERINGANGKAN HUKUMAN CORBY

A. Upaya Resmi Pemerintah Australia untuk Meringankan Hukuman Corby.

Dapat dipahami jika suatu negara membela warganya yang terkena musibah di negara lain, walaupun musibah itu berupa dakwaan telah melakukan kejahatan. Sentimen terhadap Indonesia sempat berkembang di Australia, bahkan banyak yang mengungkit soal bantuan bagi korban tsunami di Aceh dan Nias. Boikot untuk berkunjung ke Bali sebagai tempat wisata favorit bagi warga Australia diserukan oleh tokoh anti-Asia Pauline Hanson. Namun Perdana Menteri John Howard bersikap bijak dengan mengimbau rakyatnya agar menghormati hukum yang berlaku di negara lain. Sedangkan Menteri Luar Negeri Alexander Downer menyatakan, aksi-aksi kekerasan dan kritik publik terhadap Indonesia tidak akan membantu masalah ini, dan pada akhirnya malah kontraproduktif.

Selain itu, ada desakan dari publik Australia kepada Pemerintah Australia untuk melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Corby. Sehingga agenda untuk membebaskan Corby dari penjara Indonesia menjadi kepentingan nasional Australia, yang kemudian menjadi politik luar Negeri Australia, hingga kemudian kepentingan tersebut dimanejemenkan dalam diplomasi pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia. Sebagai isu politik, maka Pemerintah Australia “terus berjuang” untuk mendapatkan kebebasan Corby. Isu Corby mampu menjadi “alat ukur” rakyat Australia terhadap Pemerintahan Australia.

Dalam kasus Corby, pemerintah Australia terlihat bersemangat membantu Corby untuk lolos dari hukuman penjara 20 tahun. Berkali-kali pemerintah Australia mengirimkan surat termasuk sang perdana menteri dan menteri luar negeri mereka, kerap kali memintakan pengampunan pada pemerintah Indonesia. Bahkan, bisa jadi, Australia menekan pemerintah Indonesia lewat ancaman dan rayuan. Berikut upaya-upaya diplomatik yang dilakukan Pemerintah Australia

terhadap Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk meringankan hukuman Corby:⁸³

1. 13 Mei 2005 Pemerintah Australia mengirimkan surat ke pengadilan Indonesia yang menyebutkan tas Corby, yang dibawa saat ditangkap, disusupi penyeludup narkoba
2. 17 Mei 2005 Menlu Australia bernegosiasi dengan Indonesia agar Corby menjalani masa hukumannya di Australia
3. 11 Jan 2005 pertemuan antara Sekretaris Jaksa Agung Australia dan Jaksa Agung RI di Jakarta memunculkan wacana pertukaran narapidana Indonesia di Australia dengan narapidana Australia di Indonesia. Salah satunya Corby.
4. 27 Febuari 2013 Pemerintah Australia mengirim surat penjaminan pembebasan bersyarat bagi Corby
5. Desember 2013 Pengadilan Tinggi Australia permohonan ekstadisi mantan direksi Bank Suraya, Adrian Kiki Ariawan, ke Indonesia. Banyak pihak menilai ini berkaitan dengan grasi dan upaya pembebasan bersyarat Corby meski dibantah oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, bisa dilihat betapa Pemerintah Australia begitu serius dalam membela warga negaranya yang sedang mengalami permasalahan (hukum) di luar negeri. Keseriusan Pemerintah Australia dalam rangka untuk mengurangi hukuman Corby dapat dilihat dari beberapa surat resmi yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia.

⁸³ <http://hukum.kompasiana.com/2014/02/10/apakah-pemerintah-layak-membebasan-corby--634094.html>, diakses tanggal 18 Januari 2015

B. Pertukaran Tahanan Sebagai Jalur Diplomatik Pemerintah Australia.

Di tengah proses peradilan kasus Corby, dari pemerintah Australia sempat diwacanakan mengenai kemungkinan tukar-menukar tahanan dengan Indonesia.⁸⁴ Tetapi para aktivis antinarkoba menentang keras ide tersebut. Hal tersebut dapat dipahami, karena yang dibutuhkan untuk menangani lalu lintas peredaran narkoba dan jenis-jenis kejahatan yang mengikuti, adalah sikap yang tidak mengenal kompromi. Dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain, spesifikasi ancaman narkoba sangatlah mengerikan, mengingat yang menjadi sasaran bahaya itu adalah angkatan muda.

Namun pada faktanya, terpidana kasus narkoba Schapelle Leight Corby mendapatkan keringanan hukuman atau grasi sebanyak lima tahun dari Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Indonesia mestinya bisa berkaca dari pemberian keringanan hukuman bagi warga negara Australia tersebut. Pemberian grasi bagi Corby menunjukkan betapa Pemerintah Australia melakukan berbagai upaya diplomatik dan menekan Pemerintah Indonesia.

Pengurangan hukuman bagi Corby sang ratu Mariyuana tak bisa dipungkiri adalah bagian dari program diplomasi hukum antara Indonesia dan Australia. Hal serupa sudah terjadi dalam beberapa kasus lain dengan negara berbeda.

Hal ini telah ditegaskan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin bahwa pemberian grasi kepada Schapelle Corby merupakan langkah untuk mendorong pembebasan tahanan Indonesia di Australia. Amir Syamsuddin juga menjelaskan langkah peringanan hukuman terhadap warga asing pernah pula dilakukan kepada warga negara Malaysia dan Arab Saudi.⁸⁵

Mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia memiliki rekam jejak untuk melakukan peringanan hukuman bagi upaya diplomasi hukum, maka Pemerintah

⁸⁴ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/30/opi1.htm>, diakses tanggal 20 Januari 2015.

⁸⁵ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/05/120524_corbyupdate.shtml, diakses tanggal 20 Januari 2015.

Australia juga membebaskan tahanan-tahanan asal Indonesia sebagai upaya untuk meringankan hukuman Schapelle Corby.

Pemerintah federal Australia membebaskan dua warga negara Indonesia (WNI) lainnya karena berusia di bawah 18 tahun. Pihak KJRI di Australia telah bertemu Menteri Dalam Negeri Australia yang membawahi kepolisian dan kejaksaan Australia. Selain karena menangkap ikan di perairan Australia, tak sedikit WNI yang juga ditangkap Australia lantaran dituduh menyelundupkan manusia. Dubes Indonesia di Australia, Primo Alwi Julianto mencatat, sekitar 450-470 nelayan Indonesia yang ditahan di Australia karena dituduh menyelundupkan manusia ke Australia. Mereka menjadi anak buah kapal (ABK) yang mengangkut warga negara dari Timur Tengah. Sialnya, mereka menjadi korban tindakan sindikat penyelundupan orang ke Australia. Dari ratusan WNI yang bernasib sial itu, ada 28 orang di antaranya masih berusia di bawah umur. Tiga dari 28 anak Indonesia itu sudah dibebaskan.⁸⁶

Setelah melihat adanya itikad baik dari Pemerintah Australia yang berwujud diplomasi hukum dengan membebaskan tahanan WNI, kemudiann Pemerintahan Indonesia memberikan grasi kepada Schapelle Corby. Selain itu, pemberian grasi juga diharapkan dapat mendorong tindakan respirokal dari Pemeritah Australia. Hal tersebut ditegaskan oleh mantan Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba Schapelle L. Corby dilakukan dalam rangka hubungan diplomatik. Dalam kaitan ini, pemerintah berharap adanya asas respirokal dari pihak Australia. Dan pertimbangan lainnya adalah aspek kemanusiaan.⁸⁷

Pemerintah menganggap Australia sudah berlaku secara baik kepada Indonesia dengan melepas ratusan tahanan Indonesia di penjara-penjara mereka. Tindakan Australia itu sangat manusiawi. Sebab banyak di antara mereka merupakan anak-anak. Tapi bagi rakyat Indonesia pada umumnya, tindakan itu

⁸⁶ <http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-05-30/210584>, diakses tanggal 20 Januari 2015.

⁸⁷ <http://www.satelit9.com/2012/05/menyimak-tabir-dibalik-sby-memberikan.html>, diakses tanggal 20 Januari 2015

tidak patut dibalas dengan melepas seorang narapidana narkoba, Schapelle Corby.

Menurut Hikmahanto, apabila benar bahwa ada 'barter' dalam pemberian grasi Corby maka pemerintah telah melakukan hubungan antar negara yang bersifat transaksional namun tidak sebanding. Australia lebih banyak mendapat keuntungan daripada Indonesia.⁸⁸

Pertukaran ini tidak memperhitungkan rasa keadilan. Sebab tindakan Corby sangat membahayakan generasi muda Indonesia, sementara para tahanan yang dilepas Australia, tidak membahayakan siapa-siapa. Mereka merupakan nelayan-nelayan penangkap ikan yang terdampar di wilayah Australia karena tidak mengerti batas kedua negara apalagi koordinat yang ditentukan oleh alat navigasi modern.

Perbedaan penafsiran antara pemerintah dan rakyat ini, sangat wajar. Contohnya di era 1990-an adalah Richard Woolcott bekas Dubes Australia untuk Indonesia yang mendorong agar perbaikan hubungan kedua negara juga perlu dilakukan melalui jalur Australia Indonesia Institute, lembaga non-pemerintah.⁸⁹

C. Pemerinta Australia Mengekstradisi Koruptor Indonesia

Beberapa pelarian koruptor Indonesia diindikasikan berada di wilayah Australia. Keberhasilan dalam menangkap koruptor-koruptor tersebut akan memberikan dampak positif bagi pemerintah Indonesia. Salah satu dari koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Australia adalah Adrian Kiki Ariawan. Adrian merupakan mantan Direktur Bank Surya yang ditetapkan mendapat hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2002. Adrian terbukti melakukan

⁸⁸ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/05/24/m4ibk9-grasi-corby-dihargai-ratusan-wni-yang-ditahan-di-australia>, diakses tanggal 20 Januari 2015

⁸⁹ <http://nasional.inilah.com/read/detail/1864909/membedah-efek-grasi-schapelle-corby>, diakses tanggal 20 Januari 2015.

tindakan korupsi penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebanyak 1,5 triliun rupiah..⁹⁰

Dari semula memang pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika Schapelle Corby memunculkan pro dan kontra, termasuk di dalamnya Kejaksaan Indonesia. Kejaksaan walaupun menghormati hak prerogatif presiden, namun tetap merasa prihatin. Pada awalnya 'Kebaikan' Pemerintah Indonesia dinilai bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Australia dalam hal proses hukum buronan koruptor Indonesia yang mendekam di Negeri Kangguru itu. Wakil Jaksa Agung Darmono secara khusus menyebut contoh proses ekstradisi buron koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Ariawan. Menurut dia, Pemerintah Indonesia telah banyak berbuat baik bahkan mempertimbangkan azas kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan langkah hukum sesuai sistem hukum di Australia. "Tapi, Pemerintah Australia dengan alasan sistem hukum yang ada di sana, sehingga semacam dipersulit begitu," ujarnya.⁹¹

Tapi pada akhirnya Pengadilan Australia telah memutuskan agar Adrian Kiki diekstradisi ke Indonesia dan telah diserahterimakan di Bandara International Perth pada tanggal 22 Januari 2014. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi menyatakan, tim terpadu yang terdiri sembilan orang yang dipimpin pejabat dari Kemenko Polhukam bersama dua orang jaksa eksekutor, tiga orang polisi dari NCB/Interpol Indonesia untuk pengawalannya, dua orang dari Kemenkumham dan satu orang dari Kementerian Luar Negeri berangkat ke Australia pada 20 Januari 2014.⁹²

Hal itulah yang dipermasalahkan oleh masyarakat yang menentang pembebasan Corby, yang dianggap sebagai keputusan politis dengan adanya pertukaran tahanan antara Indonesia dengan Australia. Jarak waktu antara

⁹⁰ <http://www.solopos.com/2013/12/18/buron-kasus-blbi-diekstradisi-dari-australia-475460>, diakses tanggal 20 Januari 2015.

⁹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4fbd133420388/grasi-corby-diusulkan-barter-dengan-buronan-koruptor>, diakses tanggal 20 Januari 2015

⁹² <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/26/0805377/Perjalanan.Dua.Hari.Pulangan.Buronan.BLBI>, diakses tanggal 20 Januari 2015

pembebasan Corby dengan diekstradisikannya Adrian Kiki ke Indonesia relatif dekat, kurang dari satu bulan. Ekstradisi tahanan koruptor tersebut memberikan nilai positif terhadap perkembangan politik Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mewaspadaikan kebijakan Australia yang setuju terhadap penempatan pasukan Amerika Serikat di wilayahnya. Pemerintah Australia telah sepakat dengan penempatan pasukan Amerika Serikat di Pulau Cocos. Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat itu sudah tiba di Australia pada awal bulan April 2012. Rencananya pada tahun 2017, jumlah pasukan itu akan meningkat hingga mencapai 2.500 orang.⁹³

Bagi pemerintah Indonesia, pembebasan Corby memiliki keterkaitan dengan ekstradisi Adrian Kiki yang dilakukan oleh pengadilan Australia. Karena pengekradisian koruptor BLBI tersebut mampu memberikan penilaian positif masyarakat kepada pemerintah, menyangkut pola kebijakan politik pemerintah Indonesia di era reformasi yang menekankan pada upaya pemberantasan korupsi. Banyak media memberitakan tentang diekstradisikannya buronan ini ke Indonesia. Apabila dilihat dari rentang waktu pengekradisian Adrian Kiki ke Indonesia dengan pembebasan Corby, memang terdapat kemungkinan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki keterkaitan. Jika memang benar kedua hal tersebut memiliki keterkaitan maka kebijakan pemerintah Indonesia dapat dianggap sebagai keputusan yang rasional. Pemerintah mendapatkan dua poin positif. *Pertama*, Pada tingkat masyarakat, pemerintah mendapatkan citra positif karena berhasil mengembalikan buronan korupsi, *Kedua*, Pada tingkat politik, keberhasilan tersebut berimplikasi terhadap dukungan yang lebih besar pada kebijakan pemerintah era reformasi mengenai pemberantasan korupsi.

Dikaitkan dengan beberapa pemikiran yang ada di Indonesia, ekstradisi Adrian Kiki ini memiliki nilai penting. Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz

⁹³ http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=15585&type=8, diakses tanggal 20 Januari 2015.

mengatakan bahwa tidak seluruhnya kroni-kroni Soeharto dapat diberantas dengan mudah karena memiliki banyak jaringan bahkan di luar negeri. Disebutkan pula bahwa demokrasi yang terjadi digerakkan oleh politik uang dan intimidasi politik.⁹⁴

Secara sosial, budaya masyarakat Indonesia adalah hidup berdampingan secara damai. Seperti yang diungkapkan dalam pembukaan konstitusi, Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Secara implisit hal ini menyatakan bahwa Indonesia tidak menyukai konflik. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan, Indonesia juga lebih menyukai cara-cara damai dibanding dengan cara kekerasan. Merujuk pada pandangan idealisme yang menyatakan bahwa perdamaian dapat terjadi pada suatu negara, ketika individu maupun negara mampu menikmati kesejahteraan, kebebasan dan tidak adanya ancaman dari pihak manapun.⁹⁵ Masyarakat Indonesia juga menjunjung tinggi ajaran atau nilai-nilai agama.

Dalam hal ini, masyarakat Indonesia mempunyai pandangan yang mirip dengan apa yang dikatakan Johansen yang menyatakan bahwa munculnya kekerasan dipandang sebagai perlawanan kepada Tuhan.⁹⁶

Pada dasarnya menjalin hubungan persahabatan merupakan inti dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri ini, merupakan cerminan dari sikap masyarakat Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Merujuk pada pernyataan K. J. Holsti bahwa politik luar negeri merupakan resultante dari kondisi dalam negeri suatu negara⁹⁷, maka dapat dikatakan bahwa gaya politik luar negeri Indonesia juga merupakan cerminan dari sikap sehari-hari atau kondisi sosial dari masyarakat Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam kesatuan negara-negara Non Blok pada masa lalu, juga merupakan cerminan dari hal ini.

⁹⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012., hlm; 10

⁹⁵ Oliver P Richmond, *Peace in International Realations.*, Routledge, London, 2008., hlm; 9

⁹⁶ Jorgen Johansen, "Nonviolence: More than the Absence of Violence", dalam Webel, Charles, dan Johan Galtung (ed.), *Handbook of Peace and Conflict Studies*, Routledge, London, 2007., hlm; 145

⁹⁷ <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jgs993dedbd7afull.pdf>, diakses tanggal 20 Januari 2015

Dalam konteks demikian, Australia mempunyai posisi yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Australia yang memiliki keterkaitan erat dengan negara dan kebudayaan Barat, membuat posisinya menjadi penting karena dapat memegang peran dalam mendukung kebijakan Indonesia. Penempatan pasukan Amerika Serikat di Australia juga diharapkan tidak akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Meski, pada dasarnya penempatan pasukan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketegangan atau intensi konflik dengan Indonesia. Penempatan pasukan tersebut juga akan mendorong peningkatan anggaran dan personil militer di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa negara yang perekonomiannya sedang tumbuh pesat di Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura berpotensi untuk meningkatkan anggaran militernya, termasuk China dan Jepang di Asia Timur. Jika hal ini terjadi, maka potensi peningkatan anggaran militer tersebut juga akan dilakukan oleh India. Kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat Indonesia ikut terpengaruh.

Dengan menyadari pentingnya posisi Australia bagi Indonesia tersebut, maka Australia membebaskan tahanan WNI dan mengextradisi koruptor BLBI. Kemudian hal itu ditanggapi dengan pemberian grasi kepada Corby. Karena dari sisi hubungan luar negeri, pemberian grasi tersebut memiliki keuntungan politis seperti; pertama, upaya untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Australia, bagaimanapun kedekatan Australia dengan negara-negara Barat memberikan nilai penting tersendiri. Kedua, Perimbangan kekuatan diplomatik Indonesia dengan negara anggota Persemakmuran Inggris lainnya. Ketiga, Upaya menghadapi dinamika perkembangan politik di kawasan Pasifik Selatan yang didominasi oleh pengaruh Australia. Serta Keempat, Upaya diplomatik pemerintah Indonesia dalam mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat di masa depan. Sedangkan dalam konteks politik dalam negeri, keberhasilan pemerintah dalam melakukan ekstradisi tersebut memiliki nilai politis dan dapat menjadi langkah awal untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ekstradisi tahanan koruptor tersebut diharapkan juga dapat mendorong pengekstradisian

tahanan lain yang berada di luar negeri. Secara sosiologis, keberhasilan dalam ekstradisi tahanan korupsi dapat memberikan pengaruh positif bagi citra pemerintah Indonesia, yang berupaya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, di tengah perdebatan yang terjadi dalam masyarakat terkait keputusan tersebut, banyak keuntungan positif yang dapat diambil bagi Indonesia dan masyarakat di masa depan.

Bagi Australia, pemberian grasi bagi Corby membuktikan keseriusan Pemerintah Australia membela warganya. Dalam perkara ini, Pemerintah Australia malah terlihat mengabaikan status Corby sebagai Ratu Maryuana. Pemerintah Australia tanpa malu-malu memberikan perlindungan kepada warganya walaupun terlibat dalam sindikat peredaran mariyuana internasional.

Merujuk pada kebijakan Australia di atas, seharusnya Pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan serupa kepada warganya tanpa melihat persoalan hukum yang membelitnya terlebih dahulu. Biasanya seakan-akan pemerintah Indonesia melepaskan. Jadi ini memberikan pembelajaran pada pemerintahan kita untuk melakukan tindakan yang sama dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.